

Nomor

:

1/PM.01.02/K.AC-22/01/2026

Lhokseumawe, 19 Januari 2026

Sifat

:

BIASA

Lampiran

:

-

Hal

:

Penyampaian Hasil Pengawasan

Yth. **Ketua KIP Kota Lhokseumawe**
di -

Tempat

1. Dasar:
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

e. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

f. Surat Ketua KIP Kota Lhokseumawe Nomor 280/PL.01.8-Und/1173/2/2025 Perihal Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester II Tahun 2025.
2. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh jajaran Panwaslih Kota Lhokseumawe terhadap indikator keabsahan data dan dokumen partai politik yang melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol tipe *Viewer* semester II Tahun 2025, maka dapat disampaikan bahwa:

No.	Nama Partai Politik		Hasil Pencermatan
1	Partai Nasdem	1.	Dokumen kepengurusan dan data pengurus partai politik telah sesuai dengan indikator keabsahan.
		2.	Nama dan jabatan pengurus partai politik telah sesuai dengan indikator keabsahan.
		3.	Kepengurusan partai politik telah memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan
		4.	Tidak ada Surat Keterangan Kantor dan hanya ada dokumen domisili. Dari dokumen domisili terdapat perbedaan alamat kantor dengan isian di Sipol
		5.	Terdapat ketidaksesuaian data rekening bank

			antara isian Sipol dan dokumen yang diunggah
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.	Dokumen kepengurusan dan data pengurus partai politik telah sesuai dengan indikator keabsahan.
		2.	Nama dan jabatan pengurus partai politik telah sesuai dengan indikator keabsahan.
		3.	Kepengurusan partai politik belum memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan
		4.	Pada Surat Keterangan Kantor, tidak tercantumnya nama partai, tidak dibubuhi cap partai politik dan tidak dilampiri rekapitulasi daftar kantor tetap pengurus partai politik serta alamat kantor tetap tidak sesuai dengan isian pada Sipol.
		5.	Bukti kepemilikan nomor rekening telah sesuai dengan indikator keabsahan
3	Partai Keadilan Sejahtera	1.	Surat Keputusan tentang kepengurusan partai politik berlaku pada periode 2020-2025
		2.	Terdapat ketidaksesuaian nama dan jabatan pengurus partai politik antara surat keputusan dan isian pada Sipol
		3.	Kepengurusan partai politik telah memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan
		4.	Surat Keterangan Kantor dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik telah sesuai dengan indikator keabsahan
		5.	Bukti kepemilikan nomor rekening telah sesuai dengan indikator keabsahan
4	Partai Kebangkitan Nusantara	1.	Dokumen kepengurusan dan data pengurus partai politik telah sesuai dengan indikator keabsahan.
		2.	Terdapat ketidaksesuaian nama dan jabatan bendara antara surat keputusan dengan isian pada Sipol.
		3.	Kepengurusan partai politik telah memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan
		4.	Pada Surat Keterangan Kantor, tidak dibubuhi cap partai politik dan tidak dilampiri rekapitulasi daftar kantor tetap pengurus partai politik.
		5.	Bukti kepemilikan nomor rekening telah sesuai dengan indikator keabsahan
5	Partai Amanat Nasional	1.	Dokumen kepengurusan dan data pengurus partai politik telah sesuai dengan indikator keabsahan.
		2.	Nama dan jabatan pengurus partai politik telah sesuai dengan indikator keabsahan.
		3.	Kepengurusan partai politik belum memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan
		4.	Pada Surat Keterangan Kantor tidak dilampiri rekapitulasi daftar kantor tetap pengurus partai politik.
		5.	Bukti kepemilikan nomor rekening telah sesuai dengan indikator keabsahan
6	Partai Solidaritas Indonesia	1.	Dokumen kepengurusan dan data pengurus partai politik telah sesuai dengan indikator keabsahan.
		2.	Nama dan jabatan pengurus partai politik telah

			sesuai dengan indikator keabsahan.
		3.	Kepengurusan partai politik telah memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan
		4.	Pada Surat Keterangan Kantor tidak dilampiri rekapitulasi daftar kantor tetap pengurus partai politik.
		5.	Bukti kepemilikan nomor rekening telah sesuai dengan indikator keabsahan
7	Partai Persatuan Pembangunan	1.	Dokumen kepengurusan dan data pengurus partai politik telah sesuai dengan indikator keabsahan.
		2.	Nama dan jabatan pengurus partai politik telah sesuai dengan indikator keabsahan.
		3.	Kepengurusan partai politik belum memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan
		4.	Surat Keterangan Kantor dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik tidak ada dalam Sipol
		5.	Bukti kepemilikan nomor rekening telah sesuai dengan indikator keabsahan

3. Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Dedy Syahputra

Tembusan Yth:
Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh